

KORUPSI (LAGI)

Opini Belitong Ekspres, 1 Juli 2016

Oleh : Dwi Haryadi

Dosen FH UBB

Kembali, oknum anggota DPR kita yang terhormat terseret kasus korupsi. Bersamanya ditangkap pula sekretaris pribadinya, seorang oknum kepala dinas di Provinsi Sumatera barat, dan dua pengusaha. Kasus korupsi terkait suap proyek jalan di Sumatera Barat. Ironisnya, sang oknum anggota DPR merupakan anggota Komisi III yang membidangi hukum yang seharusnya mendorong pemberantasan korupsi, tetapi malah terlibat didalamnya.

Bulan suci Ramadhan juga tidak mampu mencegah perilaku korup, dan suap menyuap. Praktek korup memang tidak mengenal waktu kapan dilakukan, tetapi ini persoalan karakter, yaitu perilaku tidak jujur, penyalahgunaan kekuasaan, dan suka mengambil yang bukan haknya. Sanksi pidana penjara dan denda terhadap koruptor selama ini juga tidak memberi efek kepada para calon koruptor. Sebagian koruptor dijatuhi sanksi yang berat, namun sebagian yang lain terlihat belum adil karena lebih rendah dari pencuri sandal. Kasus korupsi disini jauh dari rasa malu. Koruptor dengan seragam orange KPK senyum senyum memberi keterangan kepada wartawan bak selebritis dan selalu berlingung dibalik asas praduga tak bersalah. Dinegara lain, pejabat publik yang baru mendapat tuduhan saja langsung mengundurkan diri dari jabatannya.

Partai Harus Selektif

Terjeratnya oknum anggota DPR maupun DPRD di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam kasus korupsi seharusnya menjadi tamparan keras bagi partai politik. Begitupula dengan kepala daerah yang diusung partai politik yang kemudian terlibat korupsi. Partai politik tidak bisa lepas tangan begitu saja bahwa praktik korupsi tersebut tidak terkait sama sekali dengan kebijakan, perintah atau keuangan partai politik. Minimal partai politik harus bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat, karena oknum legislatif maupun kepala daerah tersebut merupakan kadernya atau turut mengusung saat pilkada.

Partai politik harus memiliki sistem kontrol terhadap kadernya yang duduk dilegislatif maupun eksekutif agar menjadi agen-agen anti korupsi dan bukan

sebaliknya. *Pertama*, partai politik harus selektif untuk memilih kader-kader terbaiknya yang akan ikut pemilihan anggota legislatif disemua level, pusat maupun daerah. Track record anti korupsi semua calon harus digali lebih dalam sebelum ditetapkan sebagai caleg partai. Calon dengan potensi pernah terlibat KKN, meskipun dalam skala kecil penting untuk tidak direkomendasikan. Pilih kader lain atau tokoh diluar partai yang lebih bersih. Begitu juga dalam mengusung calon kepala daerah, pilih calon yang bersih dan anti KKN. Integritas calon yang diusung harus diutamakan dibandingkan modal yang dimiliki calon.

Kedua, mahar-mahar politik bagi para caleg maupun calon kepala daerah yang selama ini menjadikan ajang pesta demokrasi sebagai politik transaksional juga harus dihilangkan. Efek negatif dari mahar politik tersebut antara lain, pemilik modal yang dapat ikut pilkada dan sebagai caleg, sementara orang/tokoh yang bersih dan berintegritas serta memiliki kemampuan namun memiliki keterbatasan modal atau dana tidak dilirik oleh partai politik.

Ketiga, upaya pemenangan caleg maupun kepala daerah yang diusung harus sejauh mungkin tidak melakukan praktik-praktik *money politic*. Jika tidak, maka logika sederhana berkata, besarnya modal yang dikeluarkan untuk membeli suara rakyat harus kembali disaat kekuasaan sudah didapat.

Ketiga hal di atas harus menjadi agenda penting bagi semua partai politik, jika memang komit untuk menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jargon-jargon anti korupsi jangan hanya menjadi janji-janji, iklan-iklan dan jualan-jualan disaat kampanye untuk meraih suara rakyat, tetapi harus ada aksi nyata dengan mencalonkan caleg atau kepala daerah yang memang bersih dan berintegritas. Ini penting bagi partai agar disaat sudah terpilih dan melakukan korupsi, nama partai juga akan tercoreng.

Pilih Yang Bersih

Masyarakat sebagai pemilih harus cerdas dan juga berani menolak *money politic*. Pernyataan Pemimpin cermin rakyat atau pemilihnya menjadi terbukti, disaat masyarakat memilih karena iming-iming ini dan itu, maka disaat terpilih akan berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk iming-iming tersebut. Sekali lagi peran partai politik sangat besar disini untuk dapat mencalonkan pemimpin yang bersih dan berkualitas, sehingga masyarakat

memiliki banyak pilihan alternatif untuk memilih yang terbaik diantara yang baik-baik, dan bukan memilih yang terbaik diantara yang terburuk. Semoga....